



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat
5. Kepala Sekolah Menengah Atas se-Sulawesi Barat
6. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Sulawesi Barat
7. Kepala Madrasah Aliyah se-Sulawesi Barat

Masing-Masing
di –
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
INTEGRASI MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
YANG MEMUAT MATERI BONUS DEMOGRAFI, KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA, DAMPAK PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING PADA MATA
PELAJARAN
DI SMA/SMK/MA**

Dalam rangka mendukung Generasi Emas 2045, bonus demografi harus disikapi dengan baik. Generasi emas yang dihasilkan diharapkan adalah anak-anak bangsa yang dapat memahami isu-isu kependudukan menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah merupakan generasi muda yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM Sulawesi Barat menuju Generasi Emas 2045. Perlunya pengetahuan tentang perkawinan anak yang juga masih menjadi masalah serius bagi sejumlah daerah di Indonesia dimana kasus perkawinaan anak pada Sulawesi Barat menduduki urutan 1 di Indonesia dan mengancam masa depan anak. Oleh karena itu, perkawinan anak telah menjadi isu mendesak untuk diselesaikan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 Presiden menyebutkan, perkawinan anak harus ditekan sampai angka 8,74 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengkoordinasikan pada Kepala Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan untuk memasukkan kedalam mata pelajaran terkait yaitu Bonus Demografi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Dampak Perkawinan Anak dan Stunting.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mengkoordinasikan pada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah untuk memasukkan mata pelajaran terkait yaitu Bonus Demografi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Dampak Perkawinan Anak dan Stunting.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melakukan edukasi dan gerakan literasi tentang Materi Kependudukan yang ada ditingkat satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah.
4. Para Kepala Sekolah untuk mengintegrasikan Materi Pendidikan Kependudukan yaitu Bonus Demografi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Dampak Perkawinan Anak dan Stunting pada mata pelajaran terkait sesuai dengan kearifan lokal di Sekolah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 Juni 2022
Pj.GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP.: 19690820 199303 1 005